

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKIRPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Fadli Rubama**

**NPM : 1773110685**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fadli Rubama  
NPM : 177310685  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik  
Desa(BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan  
Masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri  
Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 9 November 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ränggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

Pembimbing

Dr.H. Panca Setyo Prihatin. S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : Fadli Rubama  
NPM : 177310685  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa  
Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Ketda,

Pekanbaru, 9 November 2021  
Sekretaris,

  
Dr.H. Panca Setyo Prihatin. S.IP.,M.Si

  
Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,  
Wakil Dekan I

Anggota

  
Indra Syafti, S.Sos, M.Si

  
Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1453 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

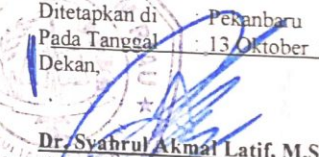
Nama : Fadli Rubama  
N P M : 177310685  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Optimalisasi Pengelolaan BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

**Struktur Tim :**

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Risky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021  
Dekan,  
  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip sk.penguji.....

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 43/UR-Fs/Kpts/2021 tanggal 13 Oktober 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Oktober 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fadli Rubama  
NPM : 177310685  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi :  
**Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Nilai Ujian : Angka : " 79,3 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 14 Oktober 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Fadli Rubama  
NPM : 177310685  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa  
Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 November 2021  
An. Tim Penguji  
Sekretaris,

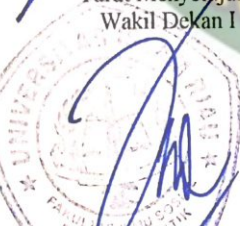
Ketua,

  
Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

  
Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,  
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Indra Syafri, S.Sos, M.Si

  
Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Sholawat berangkai salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasul yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Sayyidina Muhammad Wa’alaa Alihii Sayyidina Muhammad”, assalamualaika ya Rasulallah, assalamualaika ya Nabiyullah, assalamualaika ya Habibullah.

Adapun judul dari usulan penelitian ini yaitu “**Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**”. Penelitian ini penulis tulis dan ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupayasemaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap makluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis

terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada yang tercinta Ibu Siti Aminah dan Bapak Dasrizal, yangselalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materi maupun doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik saya Indri dan Adri beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang terspesial Juliati, yang selalu membantu dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kawan satu rumah Azham, Bobby, Mega dan Heru, serta, Awi, Agung, Isra, Ari, dan seluruh kelas IP A angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah

SWT.Aamiin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru,9 November 2021

Penulis

**Fadli Rubama**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>9</b>
A. Studi Kepustakaan.....	9
2.1 Konsep Pemerintahan.....	9
2.2 Konsep Pemerintahan daerah.....	15
2.3 Konsep Optimalisasi.....	20
2.4 Konsep Pengelolaan.....	22
2.5 Konsep BUMDes.....	24
2.6 Konsep Kesejahteraan.....	31
2.7 Konsep Hubungan Kerja.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	43

C. Kerangka Pikir.....	45
D. Konsep Operasional .....	46
E. Operasional Variabel .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Informan Penelitian .....	51
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	55
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Desa Kuntu .....	56
4.1 Keadaan Geografis Desa Kuntu .....	56
B. Keadaan Penduduk Desa Kuntu .....	57
4.2 Jumlah Penduduk Desa Kuntu .....	57
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	58
D. Keadaan Sosial Budaya.....	59
E. Sarana dan Prasarana .....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Identitas Informan .....	62

B. Hasil Penelitian Tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	66
C. Profil Badan Usaha Milik Desa Taroeba Gemilang .....	73
D. Faktor-faktor Yang Menghambat Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuntu..	75
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kuntu.....	6
II.1	: Penelitian Terdahulu tentang Optimalisasi Pengelolaan .....	43
II.2	: Konsep Operasional Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Kuntu.....	48
III.1	: Informan dan Key Informan dalam Penelitian tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuntu.....	52
III.2	: Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuntu.....	55
IV.1	: Batas Wilayah Desa Kuntu.....	56
IV.2	: Jarak Orbitasi Desa Kuntu.....	57
IV.3	: Jumlah Penduduk Desa Kuntu.....	57
IV.4	: Jumlah Keluarga.....	57
IV.5	: Lembaga Pendidikan.....	58
IV.6	: Mata Pencaharian Pokok.....	58
IV.7	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	60
IV.8	: Sarana Desa.....	61
V.1	: Identitas Informan Penelitian Mengenai Optimalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	

	Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	62
V.2	: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
V.3	: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia.....	64
V.4	: Identitas Key Informan dan Informan Berdsarkan Tingkat Pendidikan.....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman	
II.1	: Kerangka Berpikir Penelitian tentang Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuntu.....	45
V.1	: Bagan Organisasi BUMDes Kuntu.....	74



### SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadli Rubama  
NPM : 177310685  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 9 November 2021

Yang Menyatakan,



Fadli Rubama

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI  
KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

Fadli Rubama

Kata Kunci : Optimalisasi, Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa terutama harus memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Mensosialisasikan bidang-bidang usaha yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar juga merupakan salah satu cara dalam memajukan perekonomian desa guna untuk masyarakat agar bisa memanfaatkan potensi-potensi desa, misalnya Sumber Daya Alam, ataupun sumber daya manusia. Maka dari itu yang paling utama mempertimbangkan banyaknya potensi-potensi yang di punyai oleh Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi yang di tunjang oleh Badan Usaha Milik Desa Kuntu yaitu, dalam bidang perdagangan yang di laksanakan masyarakat desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sejalan dengan penelitian tujuan penelitian ini, maka dari populasi penelitian ini ialah Kepala Desa, Direktur BUMDes Taroeba Gemilang, Sekretaris BUMDes Taroeba Gemilang, dan masyarakat Desa Kuntu. Badan Usaha Milik Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar belum terlaksana secara optimal dan kegiatan yang dijalankan masih kurang berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Desa Kuntu.

**OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED  
BUSINESS ENTITIES (BUMDes) IN IMPROVING THE WELFARE OF  
THE COMMUNITY OF KUNTU VILLAGE, KAMPAR KIRI DISTRICT,  
KAMPAR REGENCY**

**ABSTRACT**

Fadli Rubama

Keywords: Optimization, Village Owned Enterprises, Community Welfare

*There are many things that can be done to improve the economy and welfare of the village, especially to promote the economy of the surrounding community. Disseminating the business fields implemented by the Kuntu Village-Owned Enterprises, Kampar Kiri District, Kampar Regency is also one way to advance the village economy in order for the community to be able to take advantage of village potentials, such as natural resources, or human resources. Therefore, the most important thing is to consider the many potentials possessed by Kuntu Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The activities carried out by the community in improving the economy are supported by the Kuntu Village Owned Enterprise, namely, in the field of trade carried out by the Kuntu village community, Kampar Kiri District, Kampar Regency, in line with the research objectives of this study, the population of this research is the Village Head, Director of BUMDes Taroeba Gemilang, Secretary of BUMDes Taroeba Gemilang, and the people of Kuntu Village. Kuntu Village-Owned Enterprises, Kampar Kiri District, Kampar Regency have not been implemented optimally and the activities carried out are still not participating in improving the welfare of the community and the economy of Kuntu Village.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Undang-undang No 32 tahun 2004 memandatkan kepada pemerintah agar mengimplementasikan atau menerapkan otonomi daerah menggunakan asasdesentralisasi.Otonomi, yang memberi daerah kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Konsep otonomi daerah mengacu pada penghormatan terhadap keunikan daerah, pemerintah memberikan hak otonomi kepada desa.Ini merupakan tindak logis bagi bangsa Indonesia, bahwa mayoritas rakyat Indonesia menempati pedesaan, dimana 70%dari keseluruhan yang ada di Nusantara. Maka dari itu pedesaan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai ketimpangan pendapatan, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan desa dan kota akan dapat lebih di wujudkan. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara keseluruhan meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial budaya dan bidang lainnya.

Undang-undang No 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa disarankan memiliki unit usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar dan ketersediaan sumber daya desa yang tidak terpakai, serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola unit usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Di era otonomi, perlu juga diterapkan kebijakan yang

memberikan akses dan kesempatan bagi desa untuk menggali potensi baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada di wilayah desa, yang dijadikan sebagai sumber pendapatan desa. Dengan demikian kini desa telah memiliki Alokasi Dana Desa(ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten, namun dibutuhkan juga unit yang mengelolahasil alam asli desa demi lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka dari itu didirikanlah Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan lain sebagainya. BUMDes dibuat dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat. Kedudukan BUMDes di desa sebagai badan hukum kunci pengembangan desa.

BUMDes didirikan bertujuan untuk memperlihatkan perwujudan untuk mengurus ekonomi produktif desa yang diterapkan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Dinyatakan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat yang paling utama dalam pemenuhan kebutuhan inti;
2. Adanya sumber daya desa yang belum di optimalkan;
3. Adanya sumber daya manusia yang sanggup mengurus unit usaha sebagai asset penggerak perekonomian rakyat;

4. Keberadaan unit-unit yang mewakili kegiatan ekonomi anggota komunitas BUMDes juga diciptakan untuk mendorong berkembangnya sistem bisnis kapitalis pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan sosial. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes telah menempatkan dirinya di sisi kepentingan masyarakat melalui kontribusinya terhadap pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial, di sisi lain, ia mencari keuntungan melalui keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Setelah munculnya Permendes No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan solusi yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung bermula dari kekayaan desa dibedakan untuk mengurus asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan didirikannya BUMDes bertujuan menampung seluruh kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Menurut Abdul Rohman dkk(2018). Pendirian BUMDes pada suatu desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Memaksimalkan asset desa agar berguna untuk kesejahteraan desa

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengurus potensi ekonomi desa
- d. Membuat Rencana kerja sama dengan desa atau dengan pihak ketiga
- e. Menyediakan peluang dan jaringan pasar yang mensupport kebutuhan layanan warga
- f. Menyediakan lapangan pekerjaan
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara evaluasi pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Dibeberapa kabupaten, kini desa sudah memiliki BUMDes, ada sebagian desa mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, dan ada sebagian desa dibantu oleh pemerintah kabupaten setempat dengan memberikan dorongan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu tepatnya di kecamatan Kampar Kiri. Kampar Kiri merupakan sebuah Kecamatan yang memiliki 20 (dua puluh) desa/kelurahan yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki ragam macam potensi pertanian, perdagangan, air bersih, dan perternakan yang belum dikelola dengan optimal di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Desa Kuntu merupakan desa tertua yang ada di Kampar kiri yang dikenal sebagai desa tempat perkembangan agama islam pada zaman dahulu, yang mana bukti peninggalan sejarahnya yaitu makam Syekh Burhanuddin. Desa kuntu merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar dengan luas wilayah 16,35 km<sup>2</sup>, dengan rincian luas pemukiman

150ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan 100ha/m<sup>2</sup>, luas perkebunan 1300ha/m<sup>2</sup>, luas kuburan 7ha/m<sup>2</sup>, luas perkarangan 70ha/m<sup>2</sup>, luas taman 2ha/m<sup>2</sup>, perkantoran 3ha/m<sup>2</sup>, dan luas prasarana umum lainnya 3ha/m<sup>2</sup>. Dengan adanya Perdes 04 tahun 2016 tentang BUMDes maka pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa kuntu bermusyawarah untuk menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan, maka dengan system voting yang lebih dominan yaitu membuka toko bangunan, dengan alasan karena adanya pembangunan desa maka didirikanlah pada 04 januari 2019 Badan usaha desa Kuntu kemudian di beri nama "BUMDes Taroeba Gemilang" telah disahkan dan ditetapkan oleh peraturan desa atau peraturan kampung.

Dari hasil pengamatan penelitian tentang usaha di desa Kuntu, badan usaha milik desa disini menjalankan jenis unit usaha untuk meningkatkan kas desa atau pendapatan desa yaitu, Perdagangan(Toko Bangunan). BUMDes Taroeba Gemilang ini baru berjalan kurang lebih 1 tahun akan tetapi masih terlihatnya ketimpangan kesejahteraan dan ada juga masyarakat yang telat dalam pembayaran terhadap BUMDes Taroeba Gemilang yang mengakibatkan jadi kurangnya pendapatan asli desa, belum optimalnya pengelolaan BUMDes Taroeba Gemilang desa kuntu, di BUMDes tersebut belum adanya regulasi tentang telat pembayaran maka dari itu pengelolaan yang baik sangat penting untuk BUMDes dan desa kuntu tersebut, dan dapat dilihat dari tabel tingkat kesejahteraan di desa kuntu pada tahun 2019-2020.

**Tabel1.1 :Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kuntu**

<b>Tingkat Kesejahteraan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	227	220
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	389	396
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	334	359
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	114	124
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	1	1
<b>Jumlah Keluarga</b>	<b>1,065</b>	<b>1,100</b>

*Sumber Data :Dokumentasi Data Desa Kuntu(2020)*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di desa Kuntu masih terlihat tinggi. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa( BUMDes Taroeba Gemilang) yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat tetapi didalam berdirinya badan usaha tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di desa Kuntu.

Beberapa fenomena terkait Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu diantaranya seperti :

1. Belum jelasnya regulasi atau sistem telat pembayarandan sanksi keterlambatan untuk telat pembayaran bagi masyarakat
2. BUMDes belum dijadikan sebagai sarana kebutuhan bagi masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes Taroeba Gemilang) di desa Kuntu untuk mengetahui permasalahan yang ada, dimana BUMDes di daerah lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tetapi mengapa BUMDes Taroeba Gemilang di desa

Kuntu belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta apakah pengoptimalan pengelolaan dari badan usaha tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Kuntu.

Beberapa hal diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **"Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **C.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Keoptimalan Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuntu
- b. Untuk Mengetahui apa saja faktor atau kendala kalau adanya masyarakat yang telat pembayaran dan tidak adanya regulasi telat pembayaran bagi masyarakat

#### **C.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan sehingga

dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.

- b. Aspek Teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pemerintahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya dalam kesejahteraan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A.Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penulisan diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

#### 2.1 Konsep Pemerintahan

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah dalamnya(S.H. Sarundajang, 2002;5)

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai perintah bearti pekerjaan menyeluruh.Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah yang keduanya ada hubungan.Setelah di tambah awalan “pe”menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah dengan akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut(dalam Syafi’ie, 2014;4)

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang sebagai objek material masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai manajemen. dari kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara. (Munaf, 2016:47)

Menurut Maulidiah dalam (Rauf, 2017) bahwa, Pemerintah secara umum adalah organisasi atau lembaga yang diberi legitimasi (legalitas) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas pemerintahan (kekuasaan negara) di suatu negara dan diberkahi dengan perangkat negara. Dengan demikian dapat diartikan bahwa unsur pokok suatu pemerintahan berupa organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang mendapat legitimasi berupa kewenangan dari masyarakat melalui proses pemilihan umum dan dilengkapi dengan aparatur negara sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraannya. Dari tugas mereka, tugas pemerintah. Oleh karena itu, administrasi publik tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan (agar dapat diterima) ketika dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer atau fungsi pelayanan dan yang kedua fungsisekunder atau fungsi pemberdayaan.

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2011:35) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dimana masyarakat biasa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai Pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka mewujudkan itu diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangua dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti, 2004:56)

Pemerintahan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan wajib menyelenggarakan pelayanan sipil

untuk semua melalui hubungan dengan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya bila diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga - lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas - tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara - cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti luas dan arti sempit yang maknanya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam Pemerintahan itu sendiri. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah, dalam konteks ini ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai kegiatan menyuruh untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Napitupulu (2007:9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2007:7).

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material yaitu Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu cara untuk menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. (Yusri Munaf 2016:47)

Menurut Sitanggang (1998:119) tujuan diadakannya Pemerintah adalah untuk mewujudkan suatu Negara yaitu kebahagiaan bersama sesuai dengan asas negaranya yang mana tidak lepas dari sifat kemanusiaan masyarakatnya secara mikro dan juga makro, sedangkan bagi bangsa Indonesia keberadaan pemerintah.

Menurut Syarifin dalam (Astomo, 2014) Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah pengertian pemerintahan berdasarkan teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “*L’Espirite des Lois*” (jiwa hukum) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai trias politik yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintah). di tiga wilayah kekuasaan negara di tiga bidang utama, yang masing-masing tidak bergantung pada kekuasaan lainnya. Daya hanya memiliki 1 (satu) fungsi:

1. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007:32), Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan antara hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam atau keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintahan dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan-pertentangan pihak yang lain dan

mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

## 2.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani "*autonomic*" yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang-undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Kaho (1997) Desentralisasi yaitu membantu sebagian dari kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat mencakup beberapa hal atau masalah yang membutuhkan tindakan lebih cepat dan daerah tidak Kita harus menunggu arahan pemerintah pusat tentang desentralisasi teritorial.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi adalah akuisisi kewenangan pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom dengan tujuan kelola pemerintah daerah sendiri. Desentralisasi termasuk struktur organisasi yang mendefinisikan bagaimana memberdayakan. Desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari berbagai definisi pemerintah daerah bisa jadi disimpulkan pemerintah daerah sedang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, sehingga terwujudnya pelayanan, pemberdayaan yang efektif dan efisien di daerahnya sendiri

Menurut The Liang Gie (1993;154) Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah menurut W. Riawan (2009;197) merupakan lembaga atau badan yang melakukan pengarahan dan mempunyai kewenangan terhadap kegiatan masyarakat dalam sebuah daerah.

Menurut Tjahja Supriatna dalam (Djaenuri, 2015;7) yang mengutip pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara, Pemerintah daerah diatur oleh hukum, Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat, Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan, Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

### 1. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi merupakan asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemeritahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi dan Gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

### 2. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

### 3. Asas Tugas Pembantuan

Asas Pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga kepada desa dengan bentuk penugasan secara langsung.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.

10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olahraga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.

### 2.3 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan



sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dihendaki. Menurut Singiresu, John Wiley dan Sons(2009) Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapat keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari satu fungsi.

Menurut Siringoringo(2005;4) mengungkapkan optimasi atau optimalisasi adalah proses pencairan solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuannya pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika ada tujuan pengoptimalan jika ada meminimumkan biaya.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 1995 : 628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Winardi (1999; 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut pandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau di hendaki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan

paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu (Andri Rizki Pratama, 2013:6).

#### **2.4 Konsep Pengelolaan**

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan

atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 13 pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibatAdanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

## 2.5 Konsep BUMDes

### 1. Pengertian BUMDes

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No.39 tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu :

- a. Pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayak pembentukan.
- b. BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan hanya dimiliki oleh individu, melainkan milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan di manfaatkan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat secara menyeluruh.

c. Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberative dan partisipatoris.

Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, Seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

d. Pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan potensi desa untuk menjunjung pembangunan desa.

## 2. Landasan Hukum BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes adalah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan peminjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes.

### 3. Tujuan BUMDes

Tujuan utama dari pendirian BUMDes yaitu :

- a. Mendorong perkembangan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal

Didalam pasal 3 Permendesa PDTT No 4 tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

### 4. Pendirian BUMDes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah yang digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta

modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

c. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d. Kesetaraan (emansipasi)

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Berkelanjutan (sustainable)

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

6. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, PemKab/pemKot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

## 7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

### a. BUMDES Banking

BUMDES yang bernamakan banking atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

### b. BUMDES Serving

BUMDES serving mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAMDes.

### c. BUMDES Brokering dan Renting

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive market yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri. Namun dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk proteksi Desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan traktor pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh swasta.

Dalam kondisi ini Desa hadir menyewakan traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibayar setelah panen.

#### d. BUMDES Trading

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan saran produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDES trading yang besar dan sukses. BUMDES berjenis trading ini tidak mampu mengimbangi capaian bisnis yang digerakkan oleh borjouis lokal yang memberi ciri khas satu Desa satu produk. Dengan kalimat lain tampaknya belum ada BUMDES yang secara gemilang tampil sebagai penanda “satu Desa satu produk”.

### 2.6 Konsep Kesejahteraan

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ada beberapa definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Walter A. Friedlander, 1961 dalam Pengantar Kesejahteraan Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc. “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepeuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

- b. Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku *Introduction to Social Work Practice* oleh Max Siporin. “Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas hidup.”
- c. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatankegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Mengacu pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat diupayakan dengan membentuk paguyuban, koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya.

Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan Perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

#### b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung didalamnya.

#### 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya

kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu, Beckerman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis.
- 2) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap Negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap warga Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet.

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

### 1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a) Tinggi (Rp >5.000.000)
- b) Sedang (Rp. 1000.000- Rp 5000.000)
- c) Rendah (< Rp. 1.000.000).

### 2) Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih Kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

### 3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

### 4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah Human development index (HDI) atau

index pembangunan manusia (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta Ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/ taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima (5) tingkat kesejahteraan, yaitu:

a) Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b) Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, dalam interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

c) Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi, dan sebagainya.

d) Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya.

e) Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan.

## 2.7 Konsep Hubungan Kerja

Kualitas lingkungan kerja itu menyangkut lingkungan kerja fisik dan psikis. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang dapat dilihat oleh indra para karyawan, seperti: kondisi kerja, penerangan dan kebersihan. Sedangkan lingkungan kerja secara psikis adalah lingkungan kerja yang tidak dapat dilihat oleh indra para karyawan, seperti: hubungan dengan rekan kerja dan atasan (Cascio, 1992 : 20).

Dari pendapat yang di kemukakan di atas, faktor hubungan kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Hubungan dengan atasan

Hubungan kerjasama yang baik antara karyawan dengan atasan akan mempengaruhi semangat kerja karyawan dan kepuasan kerja

karyawan. Karyawan cenderung senang terhadap atasan yang perhatian, mau mendengarkan pendapat bawahannya, yang bisa menghormati dan menghargai hasil kerja karyawan, dan adanya pujian atas hasil kerja yang baik.

## 2) Hubungan dengan rekan kerja

Rekan kerja yang mampu diajak kerjasama dan mendukung dalam pelaksanaan kerja cenderung berpengaruh terhadap meningkatnya semangat kerja dan kepuasan kerja para karyawan tersebut. Sebaliknya rekan kerja yang tidak bisa diajak bekerjasama akan menimbulkan konflik dalam bekerja dan hal ini berdampak negatif pada kinerja maupun semangat kerja karyawan.

Menurut (Hartono Widodo dan Judiantoro): hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Selanjutnya (Tjepi F. Aloewir:) mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.

(Tjepi F. Aloewir) Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial, Cetakan ke-11, di dalam hubungan kerja terdapat beberapa unsur antara lain yaitu:

Adanya pekerjaan

Pekerjaan (arbeid), yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja.

Unsur kedua, yaitu dibawah perintah (gezag ver houding)

Di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban memberikan perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat subordinasi (hubungan bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah). Di dalam hubungan kerja ada unsur perintah yang artinya satu pihak berhak memberikan perintah, dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakan perintah. Dalam hal ini pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerja dan pekerja berkewajiban mentaati perintah tersebut.

Unsur ketiga adalah adanya upah (loan) tertentu untuk buruh

Macam macam hubungan kerja:

Hubungan kerja vertical, hubungan kerja antara pimpinan antara pimpinan dan bawahan

Hubungan kerja horizontal (hubungan kerja antara pejabat pada tingkat atau eselon yang sama.)

Hubungan kerja fungsional (hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja sama.

Tingkat atau eselon unit atau pejabat tersebut bisa sama atau tidak sama).

Hubungan kerja informative (hubungan kerja antar unit atau pejabat dengan tingkat atau bidang apapun untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan).

Hubungan kerja konsultatif (hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar satu dengan yang lainnya).

Hubungan kerja direktif (hubungan kerja antara pimpinan unit organisasi atau pejabat yang disatu pihak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran atau nasehat dalam bidang kerja hirarkis tertentu, sedang pihak lain mempunyai kewajiban melaksanakan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasehat tersebut). Hubungan kerja koordinatif (hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama).

Pada dasarnya hubungan kerja meliputi beberapa hal berikut:

Pembuatan perjanjian kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja).  
 Kewajiban pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut). Kewajiban pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari sang pekerja atas upah).  
 Berakhirnya hubungan kerja. Cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Sumartono (2008 :05) hubungan kerja dapat dilihat dari 3 bentuk antara lain: Hubungan Dominasi adalah hubungan dalam melakukan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Hubungan Subordinasi yaitu dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua mengusaipihak pertama atau pihak pertama dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1: Penelitian terdahulu dengan permasalahan yang relatif sama**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
1	2	3	4	5
1	FaizalMulia Z (2017)	Optimalisasi BUMDes untuk Meningkatkan	Indikator : Interaksi ekonomi antara pemerintah desa	Salah satu sarana yang dimiliki pemerintah pusat melalui pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan

		anKesejahteraan Masyarakat Di Desa KarangPapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi	dengan masyarakat desa Untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengangkat keluarga kurang mampu menjadi keluarga sejahtera	masyarakat sehingga indeks pembangunan masyarakat di daerah dapat berjalan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat telah diberikan termasuk saran untuk mengoptimalkan BUMDes.
2	Afifa Rachmanda Filya(2018)	Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur(Studi Kasus di Desa Sukorejo)	Menurut PKDSSP dalam Kamaroesid(2016:20) a.Kooperatif b.Partisipatif c.Emansipatif d.Transparan e.Akuntabel f.Sustainabel	Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PADES belum optimal dikarenakan ada beberapa dimensi indicator yang belum dapat direalisasikan, dan terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes Guyub Reksa Dana yaitu belum semua pengelola atau pengurus BUMDes yang mampu bekerja sesuai dengan tugas atau job description yang telah di berikan.
3	Arif Fajar Wibisono dan Bagus Panuntun(2020)	Optimalisasi Fungsi BUMDes Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa	Indikator: Penguatan motivasi, pelatihan administrasi dan SOP organisasi, inovasi kegiatan usaha, pelatihan marketing, dan pendampingan	Pengelolaan BUMDes tidak bisa di anggap hal sepele, perlu tatakelola yang amat serius untuk mencapai tujuan BUMDes. Dan juga perlu dukungan kuat dan pemahaman oleh kepala desa atau pemerintah desa dan masyarakat desa agar BUMDes dapat terelenggara dengan baik dan tujuan BUMDes dapat terwujud.

*Sumber: Olahan Peneliti, 2021*

### C.Kerangka Pikir

**Gambar II.1: Kerangka Berpikir Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu**



*Sumber : Modifikasi Penulis,2021*

#### D.Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam melakukan kepentingan publik, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugas negara serta dilengkapi dengan alat-alat negara sebagai penukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif

4. Pengelolaan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat - Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.
5. BUMDes usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Kesejahteraan Masyarakat sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

7. Ukuran Merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat Numerik. Ukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrument untuk melakukan penilaian.
8. Tujuan merupakan pencapaian misi tertentu dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Tujuan juga disebut sebuah pernyataan tentang keadaan dimana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai inti dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu.
9. Nilai merupakan suatu gagasan yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan.
10. Fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya suatu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Winardi (1999:363) mengatakan bahwa ada empat indikator optimalisasi sebagai berikut:	Optimalisasi	Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan UkuranOptimalnya sebuah BUMDes</li> </ul>
		Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan suatu tujuan pengelolaan agar BUMDes bisa berjalan dengan baik</li> </ul>

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Ukuran, Tujuan, Nilai dan Fungsi		Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan suatu Nilai kesejahteraan dari suatu kegiatan</li> </ul>
		Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan suatu Fungsi BUMDes dalam meningkat kesejahteraan</li> </ul>



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kuntu ini adalah metode kualitatif.

Menurut Creswell (2016:4-5), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep dan fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

#### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di BUMDes Desa Kuntu yaitu Toko Bangunan Taroeba Gemilang, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian mengenai BUMDes di Desa Kuntu Kabupaten Kampar adalah tidak dapat berjalan baik serta pengoptimalan pengelolaan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan BUMDes di daerah lain dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah dengan adanya BUMDes dapat mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### **C. Informan**

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009:300) teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya karena informan dalam penelitian ini adalah orang yang kita anggap benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi, terutama mengenai judul peneliti mengenai Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

**Tabel III.1 : Key Informan dan Informan pada penelitian Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu**

No	Jabatan	Keterangan
1	Ketua Pengurus BUMDes Taroeba Gemilang	Key Informan
2	Kepala Desa Kuntu Taroeba	Informan
3	Sekretaris BUMDes Kuntu Taroeba	Informan
4	Masyarakat Pengguna BUMDes Taroeba Gemilang	Informan

*Sumber: Olahan Penulis, 2021*

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan.

#### 2. Teknik *Interview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

#### 3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Spradley. Menurut Spradley (dalam Moleong, 2014:302) analisis data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian, maka analisis data dapat dilakukan di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada empat tahapan analisis data yaitu:

a. Analisa Domain

Analisa domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat dari buku lampiran.

b. Analisa Taksonomi

Setelah selesai analisa domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

c. Analisa Komponen

Setelah analisa taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

d. Analisa Tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti.

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuntu**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																				
		Jan			Feb				Mar	Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Sep		Okt
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Penelitian Lapangan																					
5	Pengelolaan dan analisa data																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																					
8	Revisi Skripsi																					
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kuntu

##### 4.1 Keadaan Geografis Desa Kuntu

Desa Kuntu merupakan salah satu daerah yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dengan demikian Desa Kuntu adalah pusat peradaban perkembangan islam dahulunya dan Desa Kuntu adalah Desa tertua di Provinsi Riau.

Luas wilayah Desa Kuntu yang telah ditetapkan 16,35 km<sup>2</sup>, dengan rincian luas pemukiman 150ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan 100ha/m<sup>2</sup>, luas perkebunan 1300ha/m<sup>2</sup>, luas kuburan 7ha/m<sup>2</sup>, luas perkarangan 70ha/m<sup>2</sup>, luas taman 2ha/m<sup>2</sup>, perkantoran 3ha/m<sup>2</sup>, dan luas prasarana umum lainnya 3ha/m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel VI. 1 Batas Wilayah Desa Kuntu**

No	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Tanjung Emas
2	Sebelah Selatan	Desa Kuntu Darussalam
3	Sebelah Timut	Desa Teluk Paman
4	Sebelah Barat	Desa Padang Sawah

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

**Tabel VI.2 Jarak Orbitasi Desa Kuntu**

No	Indikator	Sub Indikator
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	15 Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten	80 Km
3	Ke Pemerintahan Provinsi	85 Km

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

## B. Keadaan Penduduk Desa Kuntu

### 1. Jumlah Penduduk Desa Kuntu

Jumlah penduduk desa Kuntu pada tahun 2020 berjumlah 5.284 jiwa terdiri dari:

**Tabel VI.3 Jumlah Penduduk Desa Kuntu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2719 jiwa
2	Perempuan	2565 jiwa
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>5.284 jiwa</b>

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kuntu lebih didominasi oleh laki-laki dengan berjumlah 2719 jiwa dan 2565 jiwa perempuan.

Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 1630 KK yang terdiri dari :

**Tabel VI.4 Jumlah Keluarga**

No	Jumlah	KK laki-laki	KK perempuan
1	Jumlah Kepala Keluarga	1.600 KK	30 KK
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>1630 KK</b>	

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

Dilihat dari berbagai aspek, maka desa Kuntu yang wilayahnya seluas 16,35 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk : 5.284 jiwa serta didukung dari sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas.

**Tabel VI.5 Lembaga Pendidikan**

Nama	Jumlah	Kepemilikan	Jumlah Tenaga Pengajar
Play Grup	1	Desa	5
TK	2	Desa	8
SD	3	Negeri	35
SMP/MTs	2	Negeri	33
SMA/MA	2	Negeri	36

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu, 2020*

### C. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan sumber kehidupan manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, dari jumlah penduduk 5.284 jiwa yang usia tenaga kerja berkisar 17-60 tahun diperkirakan sebanyak 4.152 jiwa. Secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Kuntu bermata pencaharian petani tetapi ada juga yang bekerja sebagai, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, buruh, pengrajin dan lain sebagainya.

**Tabel VI.6 Mata Pencaharian Pokok**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	416	273
2	Buruh	142	85
3	Pegawai Negeri Sipil	58	56
4	Pengrajin industri rumah tangga	7	7
5	Peternak	28	-
6	Pedagang	10	10
7	Bidan swasta	-	8
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>661</b>	<b>439</b>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>1.100</b>	

*SumberData : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi di Desa Kuntu tergolong sangat dinamis, hampir 80% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, sisanya 20% bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Buruh, Pengrajin industri rumah tangga, Peternak, Pedagang, dan Bidan swasta.

#### **D. Keadaan Sosial Budaya**

Rumah adalah tempat berkumpul dan tempat berlindung bagi keluarga setelah melakukan aktivitas sehari-hari, maka rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga dan masyarakat. Dari jumlah penduduk 5.824 jiwa yang mayoritas beragama islam. Suasana kehidupan beragama bagi masyarakat desa Kuntu cukup baik, rukun, aman, tentram, damai,toleransi dan saling tolong menolong, dalam menghadapi permasalahan yang timbul ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **Tabel VI.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2.264	2.107
2	Kristen	455	458
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>5.284</b>	

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

Sikap dan pola hidup masyarakat Desa Kuntu merupakan cerminan dalam nilai-nilai kehidupan beragama. Sebagai masyarakat yang beragama, tentunya memerlukan sarana peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, antara lain mesjid berjumlah 4 unit, musholla 12 unit, dan pondok pesentren 1 unit.

#### **E. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana sangat penting dimiliki oleh sebuah kampung ataupun desa karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses kebutuhannya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat misal untuk mengurus administrasi kependudukan yaitu kantor desa, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar desa dan lain sebagainya.

Tabel VI. 8 Sarana Desa

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Mesjid	4
3	Musholla	12
4	Sekolah Dasar(SD)	3
5	Sekolah Menengah Pertama(SMP/MTs)	2
6	Sekolah Menengah Atas(SMA/MA)	2
7	Pondok Pesantren	1
8	Majelis Taklim	3
9	Puskesmas Pembantu	1

*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

##### 5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini :

**Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian Mengenai Optimalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Asril	L	41	SLTA	Kades Kuntu Taroeba
2	Sabron Jamil	L	43	SLTA	Direktur BUMDes
3	Erlin Cahyani, S.E	P	27	S1	Bendahara BUMDes
4	Delniati	P	39	SLTP	Masyarakat Desa Kuntu
5	Nurma Yunita	P	34	SLTP	Masyarakat Desa Kuntu

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Dari tabel diatas yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah bapak Sabron Jamil selaku Direktur BUMDes Taroeba Gemilang. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Asril selaku Kepala Desa Kuntu

Taroeba, ibu Erlin Cahyani, S.E selaku bendahara BUMDes Taroeba Gemilang, serta 2 orang masyarakat yang tinggal disekitar BUMDes Taroeba Gemilang yaitu ibu Delniati dan ibu Nurma Yunita.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan diatas, Direktur BUMDes sebagai key informan dianggap mampu oleh peneliti dalam memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai indikator yang digunakan.

### 5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(100%)
1	Laki-laki	2	40%
2	Perempuan	3	60%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Dierktur BUMDes Taroeba Gemilang Kuntu, Kepala Desa Kuntu, Bendahara BUMDes Taroeba Gemilang, dan Masyarakat Desa Kuntu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 2 orang dengan persentase 40% dan jumlah key informan dan informan perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 60%.

### 5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur key informan dan informan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	25-30	1	20%
2	30-35	1	20%
3	35-40	1	20%
4	40-45	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Direktur BUMDes Taroeba Gemilang Kuntu, Kepala Desa Kuntu, Bendahara BUMDes Taroeba Gemilang, dan Masyarakat Desa Kuntu dengan kriteria umur 25-30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 20%, kriteria umur 30-35 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 20%, kriteria umur 35-40 tahun berjumlah 1

orang dengan persentase 20%, kriteria umur 40-45 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 40%.

#### 5.1.4 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuatan bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman key informan dan informan juga tidak akan pernah lepas dari tingkat pendidikan yang telah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan tingkat pendidikan key informan dan informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.4 Identitas Key Informan dan Iforman Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	Sekolah Dasar(SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	2	40%
3	Sekolah Menengah Atas(SMA)	2	40%
4	Strata Satu(S1)	1	20%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Direktur BUMDes Taroeba Gemilang Kuntu, Kepala Desa Kuntu, Bendahara BUMDes Taroeba Gemilang Kuntu, dan Masyarakat Desa Kuntu berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP) berjumlah 2 orang

dengan persentase 40%, Sekolah Menengah Atas(SMA) berjumlah 2 orang dengan persentase 40%, dan Strata Satu(S1) berjumlah 1 orang dengan persentase 20%.

### **B. Hasil Penelitian Tentang Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan Usaha masyarakat yang siap menggali potensi yang ada guna untuk membangun atau meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Badan usaha milik desa sudah ada sejak tahun 2005. Tetapi eksistensi BUMDes kembali booming saat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa muncul. UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Menurut saudara Sabron Jamil selaku Direktur BUMDes Taroeba Gemilang mengatakan bahwa :

*“Setahu saya sejak tahun 2005 BUMDes di berbagai daerah sudah menyebar dimana-dimana khususnya di daerah yang tertinggal perekonomiannya, tapi BUMDes Taroeba Gemilang baru diresmikan mulai beroperasi menjalankan kegiatan-kegiatannya pada tanggal 19 Juli 2019 dan sejauh ini BUMDes sudah dikenal baik oleh masyarakat tetapi belum menjadi sarana kebutuhan bagi masyarakat”*

Badan Usaha Milik desa, adalah badan usaha yang atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kuntu. BUMDes sendiri berbeda dengan usaha keuangan lainnya, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bendahara BUMDes yaitu ibu Erlin Cahyani, yang mengatakan bahwa :

*“BUMDes Taroeba Gemilang berbeda dengan badan usaha lain karena badan usaha ini dikelola langsung oleh desa dan aparat-aparat desa dan bekerja sama dengan seluruh masyarakat desa yang artinya mau menjadi masyarakat mitra. Jadi BUMDes ini juga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Kuntu. Karena pemuda dan pemudi yang tidak punya pekerjaan dapat direkrut menjadi pengelola BUMDes Taroeba Gemilang, dan tentu saja harus dapat persetujuan dari Kepala Desa maupun Diretkur BUMDes Desa Kuntu”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Taroeba Gemilang memang berbeda dengan badan usaha lainnya dimana syarat untuk menjadi anggota pengelola BUMDes adalah :

- Masyarakat asli Desa Kuntu
- Telah berusia 17 tahun
- Mendaftarkan diri
- Sehat jasmani dan rohani, dan
- Bersedia mentaati peraturan BUMDes

Karena badan usaha ini dimiliki oleh desa dikembangkan oleh desa dan dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat desa itu sendiri, maka dari itu dapat mengurangi angka pengangguran dan mampu mensejahterkan masyarakat Desa Kuntu. Dan sebagaimana visi dan misi BUMDes Taroeba Gemilang:

Visi, melalui gerakan pemberdayaan masyarakat kita tumbuhkan tradisi membangun desa

Dan misi, menggali dan memanfaatkan potensi alam yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia(SDM). Membina kegiatan BUMDes Taroeba Gemilang sebagai sarana kegiatan pengembangan ekonomi desa dengan memperhatikan nilai-nilai luhur serta kultur budaya kemanusiaan dan kelestarian lingkungan hidup. Mengembangkan kegiatan BUMDes Desa Kuntu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Mengembangkan potensi, mendorong usaha

ekonomi produktif guna menumbuhkan jiwa kewirausahaan menuju desa mandiri dan sejahtera.

Untuk melihat apakah pengelolaan BUMDes Taroeba Gemilang sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMDes bapak Sabron Jamil sebagai berikut :

*“Belum berjalan dengan baik, terkendala dalam beberapa hal, contoh BUMDes Taroeba Gemilang sulit untuk mendapatkan suplayer yang mampu mendapatkan harga barang yang lebih rendah, sehingga BUMDes Taroeba Gemilang susah bersaing harga dengan toko bangunan lainnya, apabila BUMDes Taroeba Gemilang mendapatkan suplayer dengan harga rendah maka BUMDes tersebut bisa memberikan harga murah kepada masyarakat, maka dari itu masyarakat akan bisa membangun dan dapat bangunan yang layak huni. Regulasi belum ada tentang telat pembayaran, kami hanya memakai sistem kepercayaan”* (Wawancara, 28 Juli 2021, Bapak Sabron Jamil Direktur BUMDes Taroeba Gemilang, Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya hal yang serupa tentang pengelolaan BUMDes yang di sampaikan oleh bapak Asril selaku Kepala Desa Kuntu dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan baik, mengapa demikian, karena saya lihat masih banyak masyarakat yang telat bayar dan tidak adanya regulasi dan sanksi bagi masyarakat yang telat bayar, yang saya ketahui regulasi pembayaran di BUMDes Taroeba Gemilang hanya memakai sistem kepercayaan, mungkin dari banyak masyarakatan hanya beberapa persen yang akan tepat pembayaran, maka dari itu saya harap pengurus dalam pengelolaan BUMDes, bertindak tegas demi berlansungnya BUMDes Taroeba Gemilang ini”*.(Wawancara, 28 Juli 2021, Bapak Asril Kepala Desa Kuntu, Pukul 11.00)

Selanjutnya di sampaikan oleh masyarakat Desa Kuntu yaitu ibu Delniati dalam hasil wawancara sebagai berikut :

*“Menurut pandangan saya, pengelolan BUMDes sudah berjalan dengan baik, karena saya lihat masih ada jual beli disana, apabila pengelolaan BUMDes tidak baik maka BUMDes akan tutup seperti sebelumnya”* (Wawancara, 28 Juli 2021, Ibu Delniati Masyarakat Desa Kuntu, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya pengelolaan BUMDes, seutuhnya belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya sistem atau regulasi tentang telat pembayaran, pengurus BUMDes Taroeba Gemilang hanya memakai sistem kepercayaan tentang pembayaran.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah keterlibatan masyarakat membawa atau memberikan pengaruh bagi BUMDes Taroeba Gemilang di Desa Kuntu, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Sabron Jamil selaku Direktur BUMDes Taroeba Gemilang yaitu sebagai berikut :

*“Sangat mempengaruhi, semakin banyak masyarakat yang berbelanja di BUMDes Taroeba Gemilang maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan BUMDes dan semakin sejahtera pula masyarakat di Desa Kuntu”* (Wawancara, 28 Juli 2021, Bapak Sabron Jamil Direktur BUMDes Taroeba Gemilang, Pukul 10.30 WIB)

Dapat peneliti simpulkan, apabila masyarakat Desa Kuntu banyak berbelanja di BUMDes Taroeba Gemilang maka akan mendapatkan feedback kepada masyarakat, maka dari itu keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi kemajuan sebuah BUMDes dan tentu saja dengan BUMDes maju maka masyarakat akan sejahtera.

Selanjutnya sebagai menembah pengetahuan masyarakat bagaimana cara pembagian hasil dari usaha BUMDes Taroeba Gemilang, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Sabron Jamil selaku Direktur BUMDes Taroeba Gemilang yaitu sebagai berikut :

*“Sistem bagi hasil dari BUMDes Taroeba Gemilang ini adalah 25% untuk Desa, 25% untuk dana cadangan BUMDes, 10% untuk dana sosial dan pendidikan, dan*

*40% untuk Pengurus”*(Wawancara, 28 Juli 2021, Bapak Sabron Jamil Direktur BUMDes Taroeba Gemilang, Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya untuk mengetahui apakah dengan adanya BUMDes Taroeba Gemilang dapat menambah pendapatan masyarakat, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Asril selaku Kepala Desa Kuntu yaitu sebagai berikut :

*“Tidak, karena BUMDes Taroeba Gemilang hanya menyediakan sarana dan prasarana, memudahkan masyarakat untuk pembangunan, seperti menyediakan bahan bangunan, maka dari itu BUMDes tidak menambah pendapatan masyarakat desa Kuntu.”*(Wawancara, 28 Juli 2021, Bapak Asril selaku Kepala Desa Kuntu, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya BUMDes Taroeba Gemilang tidak menambah pendapatan bagi masyarakat Desa Kuntu, hanya saja BUMDes Taroeba Gemilang mempermudah masyarakat dalam hal pembangunan dengan menyediakan toko bangunan .

Selanjutnya untuk mengetahui apakah BUMDes berdampak positif bagi masyarakat, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Delniati masyarakat desa Kuntu yaitu sebagai berikut :

*“BUMDes Taroeba Gemilang memberi dampak positif bagi masyarakat, karena memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kuntu, dan juga mempermudah masyarakat untuk membeli atau peralatan bangunan dikarenakan lokasi toko bangunan yang strategis yang terletak di jalan raya Kuntu-Padang Sawah”* (Wawancara, 28 Juli 2021, Ibu Delniati selaku masyarakat desa Kuntu, Pukul 13.00 WIB)

Dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Taroeba Gemilang berdampak positif bagi masyarakat, karena dengan adanya BUMDes

Taroeba Gemilang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Kuntu dan dengan lokasinya yang strategis di jalan Raya Kuntu-Padang Sawah membuat masyarakat lebih efektif dan efisien untuk berbelanja membeli peralatan dan bahan bangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah BUMDes Taroeba Gemilang bermanfaat bagi masyarakat, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Nurma Yunita masyarakat desa Kuntu yaitu sebagai berikut :

*“Tentu saja bermanfaat, karena memudahkan saya berbelanja bahan bangunan dengan lokasi yang strategis dekat rumah saya, selain itu menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemuda dan pemudi di desa Kuntu, sehingga mengurangi pengangguran di desa Kuntu”* (Wawancara, 28 Juli 2021, Ibu Nurma Yunita selaku masyarakat desa Kuntu, Pukul 13.00 WIB)

Dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Taroeba Gemilang sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena memudahkan masyarakat berbelanja dengan lokasi yang strategis, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Kuntu dan dapat mengurangi angka pengangguran sehingga dengan berkurangnya angka pengangguran maka masyarakat akan sejahtera.

Selanjutnya untuk mengetahui Apakah BUMDes Taroeba Gemilang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kuntu, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Sabron Jamil selaku direktur BUMDes Taroeba Gemilang yaitu sebagai berikut :

*“BUMDes Taroeba Gemilang sudah dapat dikatakan mensejahterakan sebagian masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin memulai dan telah memiliki usaha, walaupun BUMDes tidak dapat memberikan pinjaman modal tapi BUMDes dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain, seperti potongan harga dan pinjaman*

*barang berupa material bangunan untuk membangun tempat usaha masyarakat”(Wawancara, 28 Juli 2021, Bapak Sabron Jamil Direktur BUMDes Taroeba Gemilang, Pukul 10.30 WIB)*

Dapat disimpulkan berdasarkan wawancara, bahwasannya BUMDes Taroeba Gemilang sudah dapat dikatakan telah mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sedang membangun tempat usaha, walaupun tidak dengan peminjaman modal tetapi masyarakat dapat potongan harga dan dapat pinjaman barang material untuk membantu pembangunan tempat usaha masyarakat tersebut.

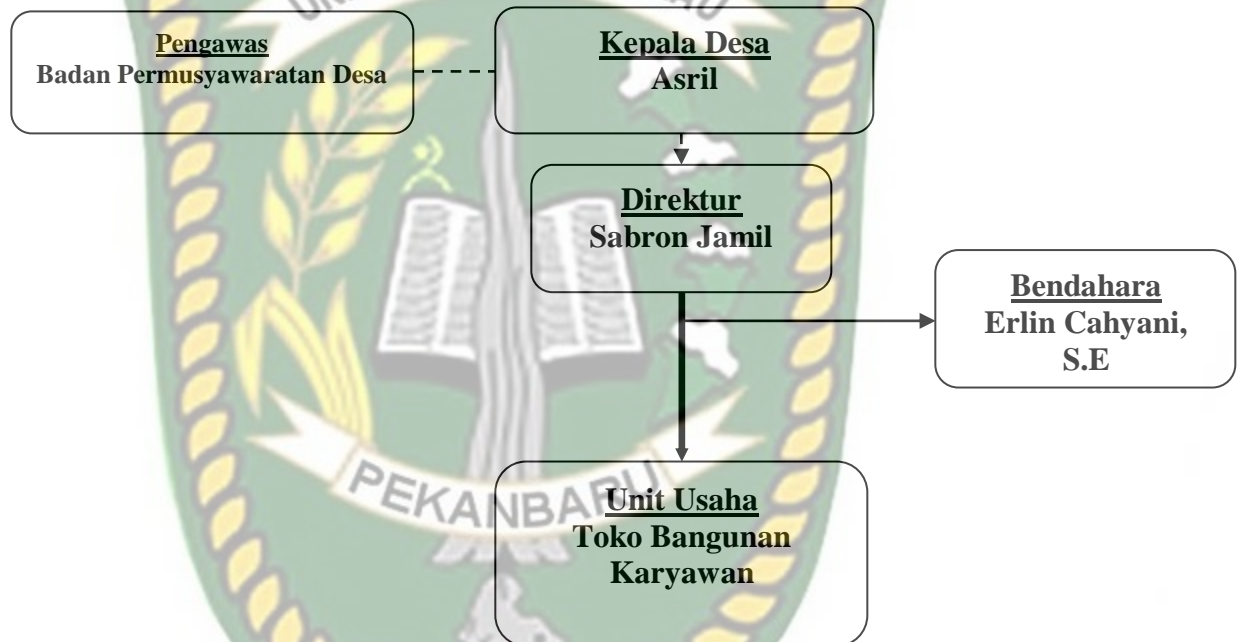
### **C. Profil Badan Usaha Milik Desa Taroeba Gemilang Kuntu**

Pada penelitian ini BUMDes yang di teliti bernama Taroeba Gemilang yang berada di desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Asril. Desa Kuntu ini memiliki Luas wilayah Desa Kuntu yang telah ditetapkan 16,35 km<sup>2</sup>, dengan rincian luas pemukiman 150ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan 100ha/m<sup>2</sup>, luas perkebunan 1300ha/m<sup>2</sup>, luas kuburan 7ha/m<sup>2</sup>, luas perkarangan 70ha/m<sup>2</sup>, luas taman 2ha/m<sup>2</sup>, perkantoran 3ha/m<sup>2</sup>, dan luas prasarana umum lainnya 3ha/m<sup>2</sup>. BUMDes Taroeba Gemilang beralamat di jalan Raya Kuntu-Padang Sawah.

Badan Usaha Milik Desa Taroeba Gemilang dibentuk pada awal tahun 2019 menurut musyawarah desa. Badan Usaha Milik Desa Kuntu memiliki unit usaha yaitu Toko bangunan, dengan pertimbangan dan tujuan agar masyarakat desa kuntu bisa berbelanja di BUMDes sehingga bisa mendapatkan bangunan yang layak, selain itu

dengan musyawarah desa tentang membentuk BUMDes toko bangunan agar pemerintah desa apabila ada pembangunan desa bisa berbelanja di Toko BUMDes Taroeba Gemilang sehingga menimbulkan feedback. Pada hari yang sama dengan di bentuknya BUMDes Taroeba Gemilang dibentuk pula struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Kuntu.

**Gambar V.1 Bagan Oranisasi BUMDes Kuntu**



*Sumber Data : Dokumentasi Data Desa Kuntu,2020*

#### **D. Faktor-faktor yang Menghambat Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor-faktor penghambat mengenai Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya modal Badan Usaha Milik Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehingga masih banyak hal-hal yang masih kurang, seperti anggota yang jumlahnya dibatasi dan unit usaha.
2. Kurangnya ketegasan pengurus Badan Usaha Milik Desa Kuntu dalam menjalankan fungsinya, seperti tidak adanya regulasi dan sanksi terhadap masyarakat yang telat pembayaran, pengurus Badan Usaha Milik Desa Kuntu hanya memakai sistem kepercayaan dan kesadaran diri dari masyarakat.
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kuntu dalam hal pengenalan akan unit usaha yang telah dijalankan. Hal ini terbukti masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang unit usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Kuntu.
4. Badan Usaha Milik Desa Kuntu susah mendapatkan suplayer harga yang murah sehingga Badan Usaha Milik Desa Kuntu Susah bersaing harga dengan toko bangunan lainnya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang telah peneliti rangkum sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dengan baik, karena sistem atau regulasi tentang telat pembayaran masyarakat tidak diberi sanksi oleh pengurus BUMDes Taroeba Gemilang, pengurus hanya memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan kesadaran diri untuk membayar telat pembayaran tersebut. BUMDes Taroeba Gemilang sudah bisa dikatakan mensejahterkan masyarakat walaupun tidak seluruh masyarakat, karena BUMDes Taroeba Gemilang memberikan potongan harga dan pinjaman barang berupa material bangunan, khususnya untuk masyarakat yang sedang membangun tempat usaha mereka. Dan selanjutnya masyarakat Desa Kuntu belum menjadikan BUMDes sebagai sarana kebutuhan. Artinya, masyarakat masih banyak membeli atau berbelanja di toko bangunan lain ketimbang berbelanja di BUMDes Taroeba Gemilang, apabila masyarakat menjadikan BUMDes Taroeba Gemilang sebagai sarana kebutuhan maka akan sangat

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena semakin banyak masyarakat berbelanja maka BUMDes akan berkembang dan bisa mensejahterakan masyarakat.

2. Strategi BUMDes Taroeba Gemilang adalah bisa bersaing harga dengan toko bangunan lain, sampai saat ini BUMDes Taroeba Gemilang sulit mendapatkan suplayer yang mampu memberikan harga barang yang lebih murah. Karena, apabila BUMDes mendapatkan barang yang lebih murah maka bisa memberikan harga jual yang murah pula untuk masyarakat, dengan harga barang atau material yang murah maka masyarakat bisa membangun dan dapat bangunan dengan layak.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi atau denda untuk masyarakat yang menunggak pembayaran di Badan Usaha Milik Desa Taroeba Gemilang dan pengurus Badan Usaha Milik Desa Taroeba Gemilang harus bertindak tegas dalam menangani masyarakat yang telat melakukan pembayaran, dengan adanya aturan dan denda maka masyarakat akan tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Dan Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Kuntu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Perlu adanya penambahan unit usaha yang baru di Badan Usaha Milik Desa Taroeba Gemilang seperti alat dan bahan pokok pertanian dan perkebunan karena mayoritas penduduk Desa Kuntu adalah petani, dengan adanya unit usaha baru akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkhusus juga bagi pihak BUMDes harus sering mengadakan kontroling dan sosialisasi sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik untuk menjadikan BUMDes sebagai sarana kebutuhan bagi masyarakat agar BUMDes dapat berjalan dengan baik sehingga bisa mensejahterkan masyarakat khususnya Desa Kuntu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Friedlander, Walter. 1961. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Aloewic, Tjepi F. 1996. *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*. Jakarta : BPHN
- Arikunto, Suharismi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Cascio.WF. 1992.*Managing Human Resources*.Productivity Quality of Work. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, A., 2015. *Kepemimpinan, etika & kebijakan pemerintahan*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Gie, The Liang. 1993, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Hartono Widodo, S.H. Dan Judiantoro, .S.H. 1989. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perbaruhan*; Jakarta. CV. Raja Wali
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*: Pekanbaru. Marpoyan Tujuh

- Muhidin, Syarif. 1992. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : STKS
- Musanef. 1993. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Haji Musagung
- Ndraha, Taliziduhu . 2001 . *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Rian Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Rao, S. S. 2009. *Engineering Optimazation : Theory and Practice, 4 th*, New Jersey. John Wiley and Son
- Sarundajang, SH. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sedarmayanti. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Silalahi, U. 2006. *Metode penelitian sosial*. Bandung: UNPAR.
- Siringoringo. 2005. *Program Linear: Seri Tenik Riset Operasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukoco Dwi Heru. 1995. *Introduction To Social Work Practice*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar

Maju

Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres

Tjandra, W. Riawan. 2009. PTUN: *Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang*

*Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Liberty

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti

### **Jurnal**

Mulia, Faizal Z. 2017. Optimalisasi BUMDes untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Di Desa Karang Papak Kecamatan Ciselok Kabupten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 101-104.

Filya, Rachmanda Afifah. 2018. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam

Meningkatkan PADES di Desa Soko Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Institut Pemerintah Dalam Negeri*, 5(1), 19-39.

Wibisono Fajar A, & Panuntun Bagus. 2020. Optimalisasi Fungsi BUMDes Melalui

Inovasi dan Manajemen Organisasi sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, 2(2), 1-9

Mulyana Nana, dkk. 2018. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Di Kecamatan Buay

Bahuga, Kabupaten Way Kanan. *Jurnal POLINELA*, 2(2), 127-177

Yulinarti, & Martini Ni Nyuman Putu G. 2021. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2),104-107

Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III(April), 221–232.

### Dokumen

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No 32 Tahun 2014 Tentang Memandatkan Kepada Pemerintah agar Mengimplementasikan Otonomi Daerah

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, Pengurusan, dan Pembubaran BUMDes untuk Mensejahterakan Masyarakat

Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes

Perdes Kuntu Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa